

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan dunia dan melestarikan alam serta menjadi kerangka acuan pembangunan negara yang ada di Dunia. Salah satu tujuannya adalah ketahanan pangan dan gizi yang baik. (Sukanti & Faidati, 2021)

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. (Kemenkes, 2018) Stunting disebabkan oleh beberapa factor, menurut (Erik et al., 2020) :

1. Pola makan yang tidak memenuhi gizi seimbang selama proses kehamilan dan setelah bayi lahir
2. Pola makan anak sejak lahir sampai usia dua tahun
3. Pemberian ASI eksklusif yang kurang dari 6 bulan

4. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) terlalu dini (kurang dari enam bulan)

Penanggulangan stunting perlu tanggung jawab bersama, baik dari Pemerintah ataupun masyarakatnya itu sendiri. Stunting dapat berdampak bagi kehidupan dimasa yang akan datang dan bukan hanya berdampak buruk terhadap tumbang kembang anak tetapi juga berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi anak yang baik dalam 1000 hari pertama dan menjaga lingkungan tetap baik bersih dan sehat. Anak stunting penyebab utamanya asupan gizi. Tak satupun penelitian yang mengatakan keturunan memegang faktor yang lebih penting daripada gizi dalam hal pertumbuhan fisik anak. (Kesmas RI, 2018)

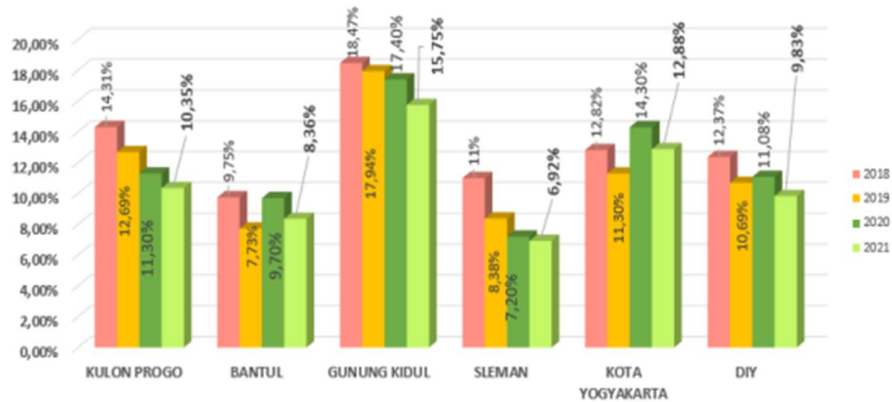
Masyarakat, umumnya menganggap pertumbuhan fisik sepenuhnya dipengaruhi faktor keturunan. Pemahaman keliru itu kerap menghambat sosialisasi pencegahan stunting yang semestinya dilakukan dengan upaya mencukupi kebutuhan gizi sejak anak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya.(Kesmas RI, 2018)

Jadi masalah stunting merupakan fenomena kesehatan yang banyak terjadi terutama di negara miskin serta terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Fenomena ini merupakan kegagalan pertumbuhan yang berakibat adanya ketidakcukupan gizi dan nutrisi di tubuh seseorang tetapi, tetapi banya masyarakat

yang kurang menyadari bahwa fenomena kesehatan kekurangan nutrisi atau gizi dan yang biasa disebut stunting adalah suatu masalah yang besar di banding masalah gizi lainnya.

Kajian mengenai stunting telah banyak dibahas di berbagai Negara. Dalam hal pengendalian stunting, penguatan intervensi gizi masih terus dilakukan mengingat pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memiliki visi untuk mencapai target zero stunting sebagai bagian dari komitmen penjaminan hak dasar setiap anak. Stunting hanya dapat ditangani secara optimal melalui kolaborasi, koordinasi dan konvergensi intervensi yang multisektoral. Oleh karena itu penguatan kolaborasi, peran, dan kontribusi elemen yang didalamnya meliputi unsur pemerintah daerah, akademisi dan peneliti, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat merupakan hal yang esensial untuk memastikan pendekatan multisektoral tersebut.

Grafik 1. 1 Persentase Balita Stunting di D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2021

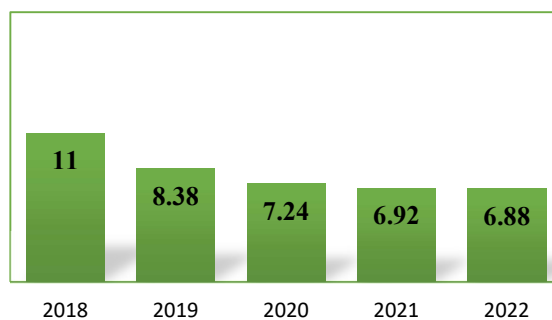


Sumber Data : Profil Kesehatan DIY, 2022

Prevalensi balita pendek di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 12,37 % dan angka ini turun menjadi 10,69 % pada tahun 2019 namun tahun 2020 naik menjadi 11,08 %. Pada tahun 2021 ini kembali turun menjadi 9,83%. Prevalensi balita pendek terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul (15,75) dan terendah Kabupaten Sleman (6,92). Dari angka ini terlihat bahwa prevalensi balita sangat pendek di DIY lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 (21.4%). (Profil Kesehatan DIY, 2022)

Kabupaten Sleman sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya untuk menurunkan prevalensi stunting untuk mendapatkan indikator penurunan stunting dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan menurunkan stunting di Kabupaten Sleman.

Grafik 1. 2 Trend Penurunan Balita Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Sleman, 2022

Dari data diatas, dalam upaya penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman memperhatikan masalah ini dengan serius dengan mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sleman dengan diiluncurkannya berbagai program. Berdasarkan data diatas menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Sleman setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dengan menetapkan target angka prevalensi sebesar 11% Tahun 2018, Tahun 2019 sebesar 8,38%, Tahun 2020 sebesar 7,24, Tahun 2021 sebesar 6,92 dan 6,88 di Tahun 2022.

Dalam kaitannya dengan Penurunan Stunting di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Pasal 6 Peraturan Presiden tersebut terdapat 5 Pilar strategi Nasional percepatan penurunan stunting yang isinya adalah :

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Dalam implementasi peningkatan visi kepemimpinan dan komitmen di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa/ Kalurahan. Melalui Pemerintah Daerah, Kustini Sri Purnomo sebagai Bupati perempuan pertama di Kabupaten Sleman, sangat berkomitmen dalam penurunan Stunting. Dalam mendukung penurunan secara terintegrasi. Diterbitkan regulasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi yang tujuannya untuk menurunnya angka stunting di Kabupaten Sleman menjadi dibawah 5 persen pada Tahun 2026. Tentunya upaya tersebut merupakan target yang sangat berat untuk diraih. Perlu adanya kolaborasi dan Kerjasama antar stakeholder terkait untuk dapat mewujudkan target tersebut. Pengambilan kebijakan tersebut merupakan salah satu peran dari seorang Bupati dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil keputusan, tentunya bawahan akan bergerak sesuai dengan arahan pemimpin jika apa yang diputuskan oleh pimpinan jelas dan dikomunikasikan dengan baik.

Dalam mendukung peraturan Bupati tersebut juga dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 124/Kep.KDH/A/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sleman. Harapannya dengan dibentuknya tim percepatan ini dapat menjadi sarana untuk menampung masukan, koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai pihak dan mendorong tim ini untuk menyusun perencanaan dan strategi dengan melibatkan

pemangku kepentingan. Penanganan stunting harus dilakukan secara bersama dari hulu hingga hilir dan bahkan menargetkan Kabupaten Sleman mencapai Zero Stunting. Kepemimpinan seorang Bupati Perempuan ini dengan membentuk tim melalui Surat Keputusan Bupati mengenai Penanggulangan stunting merupakan langkah yang sangat serius dan menunjukkan kepemimpinan menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Dalam kepemimpinannya juga, Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penurunan stunting Tahun 2021. Dikutip dari (slemankab.go.id, 2022) Penghargaan ini diberikan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapat kunjungan dari Bank Dunia dikarenakan Sleman memiliki program penurunan stunting yang baik dan mampu menekan prevalensi stunting hingga di atas rata-rata nasional. Prestasi tersebut sesuai dengan keberhasilan Kabupaten Sleman yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di Tahun 2021 sebesar 6,92 menjadi 6,88 di Tahun 2022. Tentunya keberhasilan Sleman dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kepemimpinan Bupati dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kepemimpinan Bupati Terhadap Penurunan Stunting di Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kepemimpinan dan bidang kesehatan khususnya stunting pada balita dan dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian serupa dalam lingkup yang luas dan mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten lainnya dalam kepemimpinan dan bidang kesehatan khususnya stunting.

2. Bagi Peneliti

Sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan signifikan tentang Kepemimpinan Bupati Terhadap Penurunan Stunting di Kabupaten Sleman

1.5 Tinjauan Pustaka

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	(Normaisa, Mahsyar, 2020) https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimandex.php/kimandex.php/article/view/3760	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat strategi dalam menekan laju stunting yaitu : Pertama, Corporate Strategi (Strategi Organisasi) Strategi ini berhubungan erat dengan perumusan Misi, Tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. mengadakan program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Stunting) Dinas kesehatan Enrekang juga aktifkan sosialisasi
2	(Mastina, 2021) https://mediaperencana.perencanaapembangun	Upaya pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanganan stunting balita	Penelitian menunjukkan bahwa "Gadiah Ancak, Ocu Mapan, GEMARIKAN, dan Posyandu Mobile" adalah program inovasi lokal yang

	an.or.id/index.php/mmp/article/view/35		<p>dirancang khusus untuk menangani stunting balita di Kabupaten Kampar.</p> <p>Pemerintahan daerah dapat mendorong desa untuk melakukan hal-hal baru untuk mencegah stunting sesuai dengan karakteristik lokal mereka dengan melibatkan berbagai bagian masyarakat, seperti tokoh-tokoh lokal.</p> <p>Sebagai tokoh adat yang dihormati masyarakat Kabupaten Kampar, peran ninik mamak harus dimaksimalkan dalam upaya pencegahan stunting.</p>
3	<p>(Kumayas et al., 2022)</p> <p>https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/10000</p>	<p>Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas</p>	<p>Dilihat dari Keterlibatan pemimpin dalam proses pencegahan bahkan penanganan Stunting sudah cukup baik, karena dari pemimpin sendiri sudah</p>

	ewFile/36214/33721	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe)	mengetahui Tugas dan kewenangan dalam mengatasi permasalahan Stunting, Pada dasarnya sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan beberapa Camat di kecamatan yang berbeda, bahwa pihak Kecamatan sudah berkoordinasi sampai kepada pihak Kampung dalam hal ini Kepala Desa kedepannya harus lebih meningkatkan lagi koordinasi dan mengetahui setiap tupoksi masing-masing yaitu sebagai kepala Desa
4	(Arifin et al., 2023) http://binapatri.a.id/index.php/MBI/article/view/410/312	Pemimpin Visioner Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan Pencegahan stunting dilakukan melalui 8 aksi integrasi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif. Melalui

		Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19	kegiatan ini maka pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu untuk menyesar kelompok prioritas yang selanjutnya digunakan sebagai kunci pemberian intervensi dan perbaikan tumbuh kembang sehingga keberhasilan dalam rangka menekan angka stunting akan tercapai.
5	(Camelia Viaduri et al., 2023) https://www.jurnal.unismuhpala.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/3455/2706	Faktor yang Berhubungan dengan Peran Aktif Lurah dan Kepala Desa dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang Sidempuan	Peran aktif Lurah dan Kepala Desa dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, dukungan Puskesmas, pelatihan, dan dukungan tokoh masyarakat serta masa kerja lurah / kepala desa, sehingga lurah dan kepala desa dapat lebih aktif dan semangat dalam pencegahan stunting.
6	(Agustino & Widodo, 2022)	Analisis Implementasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum

	https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/22558/11795	<p>Kebijakan Sosial</p> <p>Pencegahan Stunting</p>	<p>implementasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik.</p> <p>Namun terdapat dua permasalahan. Pertama, kurangnya sinergitas program antar OPD yang secara khusus memiliki irisan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kasus stunting, termasuk pelibatan unsur Perguruan Tinggi, NGO yang concern terhadap persoalan tersebut sampai NGO yang relevan. Kedua, belum meratanya distribusi program untuk setiap sektor DP2KB di seluruh desa/kelurahan Kabupaten Malang, termasuk yang menggabungkan aspek</p>
--	---	--	---

			<p>lembaga pendidikan formal (sekolah) dan nonformal (pondok pesantren), serta berbagai organ lain yang dapat menjadi mitra program.</p>
7	<p>(Sugianto, 2021) https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/28</p>	<p>Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia: Dengan Pendekatan What Is The Problem Represented To Be?Kabupaten Kepulauan Sula)</p>	<p>kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting lebih menekankan kepada aspek komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peran serta masyarakat sebagai isu utama. Dua isu tersebut ditampilkan sebagai representasi masalah kebijakan yang ingin diselesaikan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Sampai saat ini kebijakan</p>

			tersebut belum sepenuhnya menjangkau permasalahan yang ada.
8	(Shofiya et al., 2022) https://e-journal.unair.ac.id/MGI/article/download/40726/23530	Komitmen Pimpinan Pada Penurunan Stunting di Kabupaten Tuban Jawa Timur	Komitmen pimpinan telah terlihat pada terbitnya produk hukum berupa Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Namun masih belum ada produk hukum yang bersifat teknis untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Belum semua desa melakukan sosialisasi tugas dan fungsi kepada masing-masing anggota tim percepatan penurunan stunting. Anggaran telah dikeluarkan baik oleh desa maupun oleh bantuan lain tetapi masih

			bersifat umum dan belum berfokus pada balita stunting dan keluarga beresiko stunting. Sumberdaya manusia telah banyak melakukan kegiatan tetapi belum semua terlibat dalam kegiatan percepatan penurunan stunting, misalnya bidang pendidikan dalam hal ini adalah PAUD.
9	(Fitrauni et al., 2019) https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1237/1402	Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan melaksanakan pilar strategi penurunan stunting melalui penerapan 8 aksi konvergensi yang secara garis besar memperlihatkan terjadi penurunan persentase kasus stunting dalam kurun waktu 1

			<p>(satu) tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 16,59% turun menjadi 14,40% ditahun 2021. Upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan melalui aksi konvergensi dapat terlihat seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah terencana, diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas terutama untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi utamanya intervensi 1000 HPK.</p>
10	<p>(Dartianis et al., 2023) https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinio</p>	<p>Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya Mother menunjukkan peran pemerintah terhadap stunting di Desa Bertah sangat berpengaruh positif dapat di</p>

	n/article/view/3183/2901	Panah Kabupaten Karo	lihat banyak memiliki keunggulan dari tersedianya posyandu di kecamatan dalam menangani gizi buruk pada anak, serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan tetap memperhatikan kampromisasi dalam menangani stunting di Desa Bertah dalam menangani masalah stunting. Kondisi masalah stunting di Desa Bertah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pola hidup sehat yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan asupan makanan bergizi dalam percepatan penurunan stunting di Desa Bertah. Serta ketersediaan data masyarakat miskin yang kurang valid
--	--	-------------------------	---

			<p>sehingga beberapa program yang terdapat dalam kebijakan intervensi gizi sensitif penurunan stunting menjadi tidak tepat sasaran karena beberapa sasaran program tersebut berdasarkan pada data penduduk miskin.</p>
--	--	--	--

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Penelitian penulis ini berfokus pada Analisis Bupati dalam penurunan stunting di Kabupaten Sleman.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Peran Kepemimpinan

1.6.1.1 Peran

Peran merupakan bagian utama yang wajib dan harus dilaksanakan. Perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat perubahan dan harus berorientasi bagi kemajuan meskipun tidak pasti sesuai dengan harapan yang diinginkan. Peranan adalah adalah sekumpulan kewajiban atau sekumpulan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang diharapkan orang lain dari suatu posisi jabatan yang ia duduki.(Setiawan, 2017)

Menurut Riyadi (Brigette Lantaeda et al., 2017) peran dapat diartikan sebagai sebuah orientasi dari bagian yang dimainkan suatu pihak

dalam oposisi sosial. pelaku baik kelompok ataupun individu dapat berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seseorang dan lingkungannya. Peran diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat seperti norma, perilaku tanggung jawab dan sebagainya. Terdapat didalamnya sebuah tekanan dan kemudahan untuk melakukan pembimbingan dan arahan untuk mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Bisa juga diartikan sebagai seperangkat perilaku dengan kelompok baik besar ataupun kecil yang seluruh anggotanya menjalankan suatu peran.

1.6.1.2 Peranan

Menurut (Mukmin, 2014) Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut (Soekanto, 2022), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.6.1.3 Peranan Pemimpin

Siagian (dalam Ibrahim et al., 2020) mengemukakan bahwa peran pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Peran yang bersifat interpersonal. Peran yang bersifat interpersonal dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan symbol akan keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung.
2. Peran yang bersifat informasional. Peran yang bersifat informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan.

3. Peran pengambilan keputusan Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan konsisten.
4. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan adalah salah satu bagian dari pengelolaan organisasi. Di mana pentingnya mengawasi dan mengevaluasi suatu tindakan Pengawasan dianggap penting karena tanpa pengawasan yang baik, tujuan yang kurang memuaskan bagi organisasi dan karyawannya tidak akan tercapai.

Sarbin dan Allen (Thoha, 1995), merumuskan peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu yang mudah dikenal. Peranan kepemimpinan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang – orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terhadap hubungan yang diatur oleh nilai – nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Menurut Ivancevich (dalam Noor, 2013) bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan, ini artinya individu tidak harus

menjadi pemimpin formal untuk memimpin orang. Adapun menurut peran kepemimpinan memiliki 8 indikator yang mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Watak dan kepribadian yang terpuji
2. Prakarsa yang tinggi
3. Hasrat melayani bawahan
4. Sadar dan paham kondisi lingkungan
5. Intelegensi yang tinggi
6. Berorientasi ke masa depan
7. Sikap terbuka dan lugas
8. Widiastuara yang aktif

Menurut Rivai (dalam Afrida & Husna, 2022) Kedudukan seorang pemimpin dapat diartikan jika setiap pekerjaan mempunyai sebuah ekspektasi atau harapan dalam menanggung jabatan dalam sebuah pekerjaan. Salah satu indikatornya melalui sikap yang ditunjukkan oleh para bawahan . Seperangkat perilaku yang diharapkan oleh bawahannya dalam perannya sebagai pemimpin harus berjalan dengan sikap. Kenyataan dalam suatu organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang wajib di coba serta sikap kedudukan yang di inginkan berjalan bersamaan pekerjaan, serta pula memiliki makna kalau harapan tentang kedudukan berarti dalam berperilaku bawahnya.

Henry Mintzberg (Setiawan, 2017) mengemukakan bahwa peran seorang pemimpin itu tidak saja menjadi seorang leader, tetapi juga berperan mengambil keputusan, dan memastikan apakah keputusan itu telah dijalankan atau dilaksanakan yang kemudian membagi peranan pemimpin dalam 3 peran utama yaitu :

1. Peranan hubungan antarpribadi

Peran ini dirincikan Kembali oleh Mintzberg menjadi 3 yaitu peran sebagai tokoh, peranan sebagai pemimpin dan peranan sebagai penghubung.

- a. Peranan Sebagai Tokoh (Figurehead Role) : Peranan sebagai tokoh, pemimpin adalah merupakan figur / contoh bagi organisasi dan masyarakat.
- b. Peranan Sebagai Pemimpin (Leader Role): Peranan sebagai pemimpin (leader role), pimpinan organisasi, mengarahkan, memberi perintah, bimbingan dan petunjuk bagi anggota organisasi dan masyarakat.
- c. Peranan Sebagai Penghubung (Liaison Role): Peranan sebagai penghubung (liaison role) pimpinan sebagai penghubung bagi organisasi

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi

Peran ini dibagi menjadi 3 oleh Mintzberg yaitu Peranan sebagai pemonitor, peranan sebagai pembagi informasi dan peranan sebagai juru bicara.

- a. Peranan Sebagai Pemonitor (Monitor Role): Peranan sebagai pemonitor pemimpin harus mampu memonitor organisasi
- b. Peranan Sebagai Pembagi Informasi (Disseminator Role): Peranan sebagai pembagi informasi menyaring berbagai informasi guna kepentingan organisasi.
- c. Peranan Sebagai Juru Bicara (Spokesman) : Peran yang meneruskan informasi kepada luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan, dan hasil organisasi.

3. Peranan pengambilan keputusan

Terdapat empat peranan pemimpin yang dikelompokkan kedalam pembuatan keputusan yaitu peranan sebagai wirausaha, peranan sebagai Pereda gangguan, peranan sebagai pengalokasi sumber daya dan peranan sebagai penegosiasi.

- a. Peranan Sebagai Wirausaha (Entrepreneur Role): peran sebagai pemrakarsa dan perancang bagi sejumlah perubahan yang terkendali dalam organisasinya.

- b. Peranan Sebagai Pereda Gangguan (Disturbance Handler Role): pemimpin harus menghilangkan rintangan - rintangan yang dapat menghalangi jalannya organisasi.
- c. Peranan Sebagai Pengalokasi Sumber Daya (Resource Allocator Role): Peranan sebagai pengalokasi sumber daya (resource allocator role) memiliki Kewenangan dalam mengendalikan sumber daya organisasi.
- d. Peranan Sebagai Penegosiasi (Negotiator Role) : Seorang pemimpin harus mampu melakukan negosiasi pada setiap tingkatan, baik dengan bawahan, atasan maupun pihak luar.

Dari beberapa teori yang telah peneliti jabarkan tentang peran kepemimpinan diatas, maka teori yang paling cocok digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang berjudul “Kepemimpinan Bupati Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman 2021 – 2022” adalah Teori Henry Mintzberg yang menjelaskan bahwa setiap pemimpin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdapat 3 peran utama, yang dijabarkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 3 Peran Kepemimpinan Menurut Henry Mintzberg

Peranan pribadi (Interpersonal role)	Peranan sumber informasi (Informational role)	Peranan pembuat keputusan (Decision role)
Peranan sebagai tokoh (<i>figurehead role</i>), pemimpin adalah merupakan figur / contoh bagi organisasi	Peranan sebagai pemonitor (<i>Monitor role</i>), pemimpin harus mampu memonitor organisasi	Peranan sebagai wirausaha (<i>entrepreneur role</i>), faktor keahlian pimpinan sesuai dengan level kepemimpinannya, seorang pemimpin harus mandiri
Peranan sebagai pemimpin (<i>leader role</i>), , pimpinan organisasi, mengarahkan, memberi perintah, bimbingan dan petunjuk bagi anggota organisasi	Peranan sebagai pembagi informasi (<i>disseminator role</i>), menyaring berbagai informasi guna kepentingan organisasi	Peranan sebagai pereda gangguan (<i>disturbance handler role</i>), pemimpin harus menghilangkan rintangan - rintangan yang dapat menghalangi jalannya organisasi

Peranan sebagai penghubung (<i>liaison role</i>) pimpinan sebagai penghubung bagi organisasi, dan penghubung diantara atasan,bawahan	Peranan Sebagai juru bicara (<i>spokesman</i>), pemimpin harus berperan sebagai pembicara bagi organisasi	Peranan sebagai pengalokasi sumber daya (<i>resource allocator role</i>) memiliki Kewenangan dalam mengendalikan sumber daya organisasi
		Peranan sebagai penegosiasi (<i>negosiator role</i>), pemimpin berpartisipasi dalam kegiatan negoisasi dengan organisasi lain dan individu.

Sumber : Henry Mintzberg (dalam Setiawan, 2017)

1.6.1.4 Kepemimpinan

Seorang pemimpin memiliki kepribadian, kebiasaan, watak, dan kepribadian yang unik dan tiada bandingnya, sehingga perilaku dan gayanya membedakannya dari orang lain. Gaya hidup ini mau tidak mau mempengaruhi perilaku dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah

kekuatan kreatif aspirasi, ketahanan dan kekuatan moral yang dapat mempengaruhi anggota untuk mengubah sikapnya sesuai dengan keinginan pemimpin. Padahal, seorang pemimpin harus menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan suatu tugas.

Kepemimpinan adalah kekuatan semangat dan mampu membangun aspirasional bagi para anggotanya sehingga menjadikan searah dengan apa yang di inginkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin menjadi sosok yang dipanut oleh adan dijadikan teladan oleh anggotanya. Seorang pemimpin memiliki kepribadian, kebiasaan, watak, dan kepribadian yang unik dan tiada bandingnya, sehingga perilaku dan gayanya membedakannya dari orang lain. Gaya hidup ini mau tidak mau mempengaruhi perilaku dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuatan kreatif aspirasi, ketahanan dan kekuatan moral yang dapat mempengaruhi anggota untuk mengubah sikapnya sesuai dengan keinginan pemimpin. Padahal, seorang pemimpin harus menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan suatu tugas.

Substansial dalam berjalannya kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu elemen paling krusial dalam berjalannya kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam suatu organisasi. Tujuan dari pemimpin adalah mampu mengarahkan dan mempengaruhi orang lain

untuk menggapai tujuan yang telah di rancang. Kualitas Kepemimpinan seharusnya harus Selalu ditingkatkan baik dari dalam segi kompetensi, profesionalitas dan komitmen demi kepentingan diri sendiri dan masyarakatnya. Dengan Kepemimpinan yang berkompetensi dan berintegritas tentunya akan sangat berdampak bagi kesejahteraan rakyatnya. (Ramli, 2017)

1.6.2 Stunting

1.6.2.1 Definisi Stunting

Definisi Stunting Stunting merupakan istilah para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO Stunted adalah tinggi badan yang kurang ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Stunted merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dimasa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak.

1.6.2.2 Penyebab Stunting

Penyebab Stunting: Menurut beberapa penelitian, stunting pada anak adalah proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Ini adalah proses terjadinya stunting

pada anak, dan kemungkinan menjadi lebih parah dalam dua tahun pertama kehidupan mereka. Faktor gizi ibu memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin secara tidak langsung, baik sebelum dan selama kehamilan. Ibu yang mengonsumsi makanan yang tidak cukup akan menyebabkan janin mengalami Intrauterine Growth Retardation (IUGR), yang berarti bayi akan lahir dengan gizi rendah dan mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan.

Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pertumbuhan lebih rentan terhadap kekurangan gizi karena kebutuhan metabolisme yang meningkat, nafsu makan yang rendah sehingga dapat meningkatkan kekurangan gizi pada anak. Mengatasi gangguan pertumbuhan yang berpotensi menyebabkan stunting menjadi semakin sulit dengan keadaan ini. Seperti yang disebutkan di atas, gizi buruk kronis, dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Terdapat tiga faktor utama penyebab stunting yaitu sebagai berikut:

1. Asupan makanan tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air).
2. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR),
3. Riwayat penyakit.

1.6.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Stunting

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stunting Beberapa faktor yang berhubungan dengan stunting termasuk kekurangan protein dan energi,

sering mengalami penyakit kronis, praktik pemberian makan yang tidak sehat, dan faktor kemiskinan. Proses pertumbuhan anak mencerminkan standar gizi dan kesehatan. Prevalensi stunted meningkat dengan bertambahnya usia, peningkatan terjadi dalam dua tahun pertama kehidupan, proses pertumbuhan anak masa lalu mencerminkan standar gizi dan kesehatan. Menurut laporan UNICEF (1998) beberapa fakta terkait stunted dan pengaruhnya antara lain :

1. Anak – anak dengan stunting berdampak dengan masa depan anak tersebut sendiri. Terutama dengan masa depannya karena anak stunting cenderung lebih tertinggal dalam perkembangannya. misalnya dalam sekolah akan cenderung sering absen masuk sekolah dan lebih lama masuk sekolah daripada anak dengan gizi yang baik. Stunting terjadi lebih awal sebelum usia enam bulan, akan lebih berat dan kelihatan menjelang usia dua tahun. Stunting yang parah pada anak-anak akan terjadi defisit jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah, dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal.
2. Kesehatan dan perkembangan anak akan sangat terpengaruh oleh stunting. Ada kemungkinan bahwa pertumbuhan dan perkembangan intelektual terganggu oleh komponen dasar yang menyebabkan stunted. Bayi berat lahir rendah, ASI yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai, diare berulang, dan infeksi pernapasan

adalah penyebab penurunan ukuran tubuh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak dengan gangguan gizi mengkonsumsi makanan yang berada di bawah rekomendasi kadar gizi. Keluarga mereka miskin dengan banyak keluarga dan tinggal di komunitas pinggiran kota dan pedesaan.

3. Kekurangan gizi dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada anak usia dini yang mengalami stunting. Anak stunting pada usia lima tahun cenderung hidup lebih lama, kegagalan pertumbuhan anak usia dini berlanjut pada masa remaja, dan kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang stunted, yang berdampak secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, meningkatkan kemungkinan melahirkan anak dengan BBLR.

1.6.2.4 Penurunan Stunting

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sementara itu, intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi

sebesar 70 persen sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya. (Lancet, 2013)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan, terdapat 9 point intervensi gizi spesifik, yaitu:

1. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurus;
2. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, wanita usia subur dan ibu hamil;
3. Promosi konseling menyusui;
4. Promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
5. Tatalaksana gizi
6. Pemantauan dan promosi pertumbuhan;
7. Suplementasi mikronutrien;
8. Pemeriksaan kehamilan dan imunisasi;
9. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Sedangkan intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif terbagi menjadi 4 jenis yaitu :

1. Penyediaan air minum dan sanitasi,
2. pelayanan gizi dan kesehatan,
3. peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi
4. Peningkatan akses pangan bergizi.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Peranan Pemimpin

Peran Pemimpin adalah Peran merupakan bagian utama yang wajib dan harus dilaksanakan. Perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat perubahan dan harus berorientasi bagi kemajuan. Seorang pemimpin harus mempunyai kecakapan dan potensi yang lebih dalam kepemimpinannya.

1.7.2 Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang paling dasar akibat kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama

kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.

1.8 Definisi Operasional

Dari Teori tentang peran pemimpin yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg pada kerangka teori, maka selanjutnya akan diturunkan menjadi definisi operasional melalui tabel berikut :

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter	Pertanyaan
Peran Pemimpin menurut Menurut Mintzberg (dalam Setiawan, 2017)	Peranan Hubungan Antarpribadi (<i>Interpersonal role</i>)	1. Peranan sebagai tokoh (<i>figurehead role</i>) 2. Peranan sebagai pemimpin (<i>leader role</i>)	1. Bagaimana peranan bupati sebagai figure pemimpin untuk menggerakkan seluruh pihak terkait dalam penurunan stunting? 2. Bagaimana peran bupati dalam memberikan arahan, memberi perintah,

		<p>3. Peranan sebagai penghubung (<i>liaison role</i>)</p>	<p>bimbingan dan petunjuk dalam penanggulangan stunting?</p> <p>3. Bagaimana membangun pola komunikasi antar anggota komunikasi dalam penanggulangan stunting?</p>
	<p>Peranan sumber informasi (<i>Informational role</i>)</p>	<p>1. Peranan sebagai pemonitor (<i>Monitor role</i>)</p> <p>2. Peranan sebagai pembagi informasi</p>	<p>1. Bagaimana Bupati dalam memonitoring organisasi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan?</p> <p>2. Bagaimana peran bupati dalam pemberian informasi atau edukasi ke</p>

		<p><i>(disseminator role)</i></p> <p>3. Peranan Sebagai juru bicara <i>(spokesman)</i></p>	<p>masyarakat mengenai stunting?</p> <p>3. Bagaimana peranan Bupati dalam memberikan pengarahannya dengan pihak terkait dalam penanggulangan stunting?</p>
	<p>Peranan pembuat keputusan <i>(Decision role)</i></p>	<p>1. Peranan sebagai wirausaha <i>(entrepreneur role)</i></p> <p>2. Peranan sebagai pereda gangguan <i>(disturbance handler role)</i></p>	<p>1. Bagaimana peran bupati dalam kemandiriannya untuk mengatasi masalah stunting?</p> <p>2. Bagaimana Pemimpin mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan stunting?</p>

		3. Peranan sebagai pengalokasi sumber daya (<i>resource allocator role</i>)	3. Bagaimana Bupati mengelola sumberdayanya dalam penanggulangan stunting ?
		4. Peranan sebagai penegosiasi (<i>negosiator role</i>),	4. Bagaimana peran pemimpin dalam bernegosiasi dengan pihak terkait untuk penanggulangan stunting?

Berdasarkan Teori Henry dan Mintzberg terdapat teori Interpersonal role yaitu peran pribadi dari seorang bupati sebagai tokoh, pemimpin dan penghubung. Dalam Pembuat keputusan juga seorang bupati juga sebagai pengambil keputusan dalam penanggulangan stunting. Sebagai Sumber Informasi, Seorang Bupati harus menjadi sumber informasi bagi pihak - pihak terkait dalam penanggulangan stunting. Maka dari itu peneliti menggunakan teori tersebut karena telah sesuai dengan Analisis

Kepemimpinan Bupati Dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Sleman
2021 – 2022.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Denzin dan Lincoln (Setiawan, 2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan interpretasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh si peneliti. Penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi/penafsiran terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh peneliti. Selain itu untuk menjelaskan secara sistematis karakteristik atau fakta dari populasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan fokus penelitian mengetahui kepemimpinan bupati Kabupaten Sleman. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan baik/buruknya suatu komunitas maka dirasa lebih tepat menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mendalam namun bukan dengan angka akan tetapi dengan hasil wawancara dengan narasumber., dokumen – dokumen dan observasi di lapangan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian. Tempat yang dipilih peneliti ini sudah diamati serta peneliti juga mendalami fenomena yang sedang terjadi di tempat tersebut guna memperoleh data penelitian yang valid. Pemilihan tempat atau lokasi

ini disesuaikan dengan judul dan tema yang diambil dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan intitusi yang berkaitan dengan Kepemimpinan dan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting.

1.9.3 Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (Pramiyati, 2017). Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan yang ada. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu peneliti dapat memperoleh data primer melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung.

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih informan yang memiliki informasi mengenai objek penelitian dan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai berikut :

1. Kustini Sri Purnomo, Bupati Sleman.
2. Cahya Purnama, Kepala Dinas Kabupaten Sleman
3. Anif Muchlasin, Bagian Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
4. Dr.Raudi Akmal, DPRD Kabupaten Sleman.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang atau melalui dokumen atau arsip.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara (interview)

Menurut (Herdiyanto, 2016) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewed) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dengan fokus penelitian dan diarahkan ke pusat penelitian. (Moleong, 2018)

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kustini Sri Purnomo, dengan alasan Kustini Sri Purnomo merupakan objek yang diteliti. Kepala Dinas Kesehatan, Anif Muchlasin dan

Raudi Akmal untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Kepemimpinan Kustini dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2022.

2. Teknik Observasi (pengamatan)

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

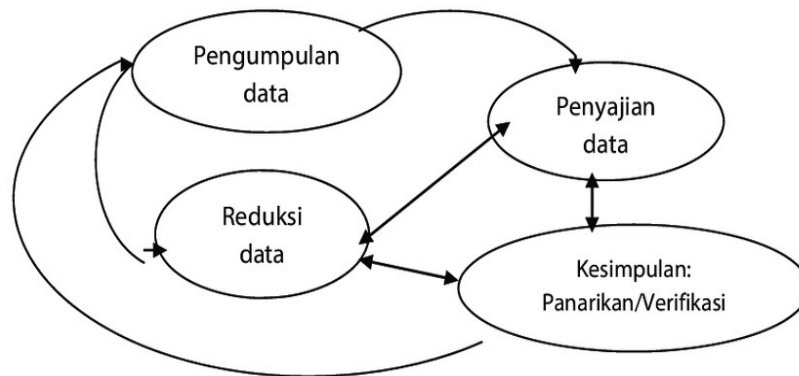
3. Teknik Dokumentasi

Menurut Riduwan (dalam Nurwanda & Badriah, 2020) Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto- foto, data yang relevan penelitian

1.9.5 Analisis Data

Noeng (dalam Rijali, 2019) Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Gambar 1. 1 Analisis Data Menurut Miles & Huberman



Sumber : Miles & Huberman (dalam Rijali, 2019)

Proses analisis data kualitatif menurut (Rijali, 2019) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.